



RENJA PERUBAHAN

2025

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SRAGEN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sragen Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sragen Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bersama ini kami sampaikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang

CAMAT SRAGEN

Heru Susanto, S.STP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19780622 199711 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN II.....

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II..... 3

2.2 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 15

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah.....15

BAB IV PENUTUP 21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Tri
 Wulan II..... 5

Tabel 2.2 Analissi Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

Tabel 3.1 Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perubahan Perangkat
 Daerah..... 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Sragen, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Sragen merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Sragen, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rancangan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang dicabut Sebagian dengan PP No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 19);

9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2025, tanggal 17 Juli 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan dengan:

1. Perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik dari aspek kebijakan nasional, provinsi, maupun daerah.
2. Perubahan kebijakan anggaran daerah.

Perubahan Renja PD bertujuan untuk:

1. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, agar kegiatan perangkat daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan terbaru.
2. Menyesuaikan target dan sasaran kinerja sesuai dengan kemampuan riil keuangan daerah dan dinamika pelaksanaan di lapangan.
3. Mengoptimalkan pencapaian target pembangunan, dengan memperbaiki atau mengganti kegiatan yang tidak lagi relevan atau tidak dapat dilaksanakan.
4. Mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja Kecamatan Sragen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SRAGEN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II.

Rencana Renja Kecamatan Sragen tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan guna mengevaluasi dan mengontrol pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Sragentahun 2025 telah melewati triwulan II. Sebagian program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Kecamatan Sragen Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sragensampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat ditampilkan dalam tabel pada berikut:

**Hasil Renja OPD Kecamatan Sragen Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan II**

No	Indikator	Target RKPD Th. 2025	Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai IKM	90.5	-	-	Nilai Belum Keluar
2	Nilai SAKIP	61.6	-	-	Nilai Belum Keluar

Tabel 2.1

**Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Renja Kecamatan Sragen Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan II**

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja s.d Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				17.882.138.881		6.794.066.143		37,99
	7.01	KECAMATAN				17.882.138.881		6.794.066.143		37,99
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase ketercapaian Pelayanan Umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	8.099.292.498	50	3.951.965.343	50	48,79
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	100	7.154.220.398	50	3.599.412.133	50	50,31
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Orang	53	7.154.220.398	53	3.599.412.133	100	50,31
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	%	100	231.349.100	50	92.524.900	50	39,99
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	paket	12	16.958.000	6	9.877.000	50	58,24
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	paket	12	69.153.000	6	27.648.000	50	39,98
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	119.127.500	6	47.332.500	50	39,73
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	18.075.600	6	7.297.400	50	40,37
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	8.035.000	1	370.000	20	4,60

	7.01.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%	100	541.703.000	50	217.750.633	50	40,20
	7.01.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	163.650.000	6	65.184.633	50	39,83
	7.01.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	34.840.000	6	11.180.000	50	32,09
	7.01.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	343.213.000	6	141.386.000	50	41,19
	7.01.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	172.020.000	50	42.277.677	50	24,58
	7.01.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	142.020.000	53	41.364.677	100	29,13
	7.01.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	913.000	1	3,04
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	100	2.214.851.200	50	950.862.500	50	42,93
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkoordinir dengan Baik	kegiatan	1	295.974.000	1	136.137.000	50	46,00
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	22.374.000	1	22.137.000	50	98,94
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan	12	273.600.000	5	114.000.000	41	41,67

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	1.625.400.000	50	709.758.000	50	43,67
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	1.625.400.000	5	709.758.000	41	43,67
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	urusan	1	293.477.200	1	104.967.500	50	35,77
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	293.477.200	5	104.967.500	41	35,77
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga Desa yang aktif	%	100	7.226.200.583	25	1.782.608.500	25	24,67
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	%	100	7.226.200.583	25	1.782.608.500	25	24,67
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	laporan	12	6.534.164.623	6	1.715.532.000	25	26,25
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan	12	692.035.960	6	67.076.500	25	9,69
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	21.000.000	50	8.750.000	50	41,67
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	21.000.000	50	8.750.000	50	41,67
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	21.000.000	6	8.750.000	50	41,67

	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	100	21.000.000	50	8.750.000	50	31,65
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggara dengan Baik	%	100	315.624.600	50	99.879.800	50	18,00
	7.01.05.2,01.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [Orang]	orang	1000	299.999.600	300	99.879.800	30	0,00
	7.01.05.2,01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	100	15.625.000	0	0	0	0,00
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	%	100	5.170.000	50	0	50	13,00
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	%	100	5.170.000	50	0	50	13,00
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	2	5.170.000	1	0	50	12,00

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan capaian kinerja belum maksimal, diantaranya:

1. Beberapa sub kegiatan pelaksanaan kegiatan ada di triwulan III dan triwulan IV;
2. Rasionalisasi Anggaran Tahun 2025 dengan menggeser beberapa sub kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

Sedangkan untuk faktor pendorong yang menyebabkan capaian kinerja sudah maksimal, diantaranya :

1. Target rencana kinerja sudah sesuai dengan target perencanaan kinerja;
2. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sragen

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinarja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan		
1.1.	Meningkatnyakualitas dan akses pelayanan public di Kecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumbe Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat SAKIP	• Alasan Pemilihan Indikator: • Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.

Tabel 2.2
Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
					UNSUR KEWILAYAHAN								
					KECAMATAN								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	%	8.099.292.498	100	%	8.097.698.498	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	%	7.154.220.398	100	%	7.154.220.3986	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang	7.154.220.398	53	Orang	7.154.220.398	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100	%	231.349.100	100	%	226.150.100	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	16.958.000	12	Paket	17.730.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	69.153.000	12	Paket	70.387.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	119.127.500	12	Paket	115.527.500	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	18.075.600	12	Paket	18.075.600	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	8.035.000	12	Laporan	4.430.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	541.703.000	100	%	540.458.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12	Laporan	163.650.000	12	Laporan	162.405.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12	Laporan	34.840.000	12	Laporan	34.840.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	343.213.000	12	Laporan	343.213.000	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	172.020.000	100	%	176.870.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	142.020.000	31	Unit	146.870.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000	2	Gedung	30.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan	100	%	2.214.851.200	100	%	2.297.370.400	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkoordinir dengan Baik	1	Kegiatan	295.974.000	100	%	295.974.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	22.374.000	11	Laporan	22.374.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Laporan	273.600.000	12	Laporan	273.600.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%	1.625.400.000	100	%	1.703.419.200	
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.625.400.000	12	Laporan	1.703.419.200	
7	01	02	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	Urusan	293.477.200	1	Urusan	297.977.200	
7	01	02	2	04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	293.477.200	12	Laporan	297.977.200	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga Desa yang aktif	100	%	7.226.200.583	100	%	7.821.200.583	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	100	%	7.226.200.583	100	%	7.821.200.583	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	12	Laporan	6.534.164.623	12	Laporan	7.165.992.313	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	692.035.960	12	Laporan	655.208.270	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100	%	21.000.000	100	%	21.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	21.000.000	100	%	21.000.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	21.000.000	12	Laporan	21.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terkoordinir dengan Baik	100	%	413.474.600	100	%	452.749.400	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggara dengan Baik	100	%	413.474.600	100	%	452.749.400	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1000	Orang	299.999.600	50	Orang	439.999.400	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	Orang	113.475.000	75	Orang	12.750.000	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100	%	5.170.000	100	%	5.170.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	100	%	5.170.000	100	%	5.170.000	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	Laporan	5.170.000	3	Dokume n	5.170.000	
Jumlah									17.627.054.294			17.982.513.881	

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan Renja tahun 2025 ada beberapa penyesuaian terkait sub kegiatan, indikator, target dan jumlah pagu anggaran. Beberapa penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 Sub Kegiatan yang berkurang anggarannya karena refocusing anggaran, hal tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 100.2.4.4./241/25/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 di Kabupaten Sragen , Sub Kegiatan tersebut adalah :
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terdapat 1 sub kegiatan yang berkurang jumlah anggarannya menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH dan perhitungan kebutuhan riil tahun berjalan, Sub kegiatan tersebut adalah :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Terdapat 2 sub kegiatan yang bertambah jumlah anggarannya menyesuaikan kebutuhan riil tahun berjalan, sub kegiatan tersebut adalah:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Terdapat 27 sub kegiatan yang tetap anggarannya

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2024

- **3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah**

- Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sragen tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.** Sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Sragen yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, maka perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam program sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Program
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sesuai karakteristik Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur kewilayahan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan, maka pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sragen sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2025. Selanjutnya, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator dan target kinerja serta pagu indikatif kebutuhan dananya dapat ditampilkan dalam tabel di halaman berikut

Tabel 3.1
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sragen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sragen

Kode	Urusan /Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	8.099.292.498	8.097.698.498					8.564.665.534
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	7.154.220.398	7.154.220.398 6					7.653.438.334
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Sragen	62 orang/ bulan	62 orang/ bulan	7.154.220.398	7.154.220.398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	7.653.438.334
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	231.349.100	226.150.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	207.849.600
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sragen	7 paket	7 paket	16.958.000	17.730.000					16.958.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sragen	7 paket	7 paket	69.153.000	70.387.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	63.105.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Sragen	7 paket	7 paket	119.127.500	115.527.500			Prosentase ketercapaian pelayanan umum,		99.151.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										kepegawaian dan keuangan		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Sragen	7 paket	7 paket	18.075.600	18.075.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	18.075.600
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Sragen	1 laporan	1 laporan	8.035.000	4.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	10.560.000,
7.01.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	541.703.000	540.458.000					524.817.600
7.01.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sragen	7 laporan	7 laporan	163.650.000	162.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	166.116.600
7.01.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sragen	12 laporan	12 laporan	34.840.000	34.840.000	Dana Transfer Umum-DAU		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	35.570.000
7.01.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Sragen	12 laporan	12 laporan	343.213.000	343.213.000					323.131.000
7.01.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	172.020.000	176.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	178.560.000
7.01.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipe;ihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Sragen	36 unit	36 unit	142.020.000	146.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	153.560.000
7.01.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Sragen	1 unit	1 unit	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100 %	25.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										pemerintahan daerah		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	2.214.851.200	2.297.370.400				100 %	2.298.495.199
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi	Kecamatan Sragen	1 dokumen	1 dokumen	295.974.000	295.974.000					295.974.000,
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Sragen	7 laporan	7 laporan	22.374.000	22.374.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	100 %	22.374.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sragen	1 Dokumen	1 Dokumen	273.600.000	273.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				273.600.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				1.625.400.000	1.703.419.200					1.703.419.200
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.625.400.000	1.703.419.200					1.703.419.200
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kecamatan Sragen	urusan	urusan	293.477.200	297.977.200					299.101.999
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sragen	7 laporan	7 laporan	293.477.200	297.977.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan		299.101.999
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga Desa yang aktif	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	7.226.200.583	7.821.200.583					6.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	122 paket		6.534.164.623	7.165.992.313					4.740.634.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29 Pokmas		692.035.960	655.208.270					602.741.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Sragen	12 laporan	12 laporan	207.076.000	207.076.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase lembaga Desa yang aktif		6.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporankejadian	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	21.000.000	21.000.000				100 %	21.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	21.000.000	21.000.000					21.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Sragen	12 laporan	12 laporan	21.000.000	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan laporan kejadian		21.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	413.474.600	452.749.400				100 %	654.631.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	413.474.600	452.749.400					654.631.000
7.01.05.2.01.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Sragen		200 Orang	299.999.600	439.999.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akomodir usulan kegiatan pokir Dewan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik		639.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.05.2,01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Sragen	50 orang	50 orang	113.475.000	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik		15.631.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	5.170.000	5.170.000				100 %	30.500.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Sragen	100 %	100 %	5.170.000	5.170.000					30.500.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Sragen	12 laporan	12 laporan	5.170.000	5.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 %	28.000..000
TOTAL						17.627.054.294	17.982.513.881				20.496.568.638	

BAB IV PENUTUP

Kecamatan Sragen sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sragen telah menyusun rencana strategis Kecamatan Sragen tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Kecamatan Sragen juga menyusun rencana kerja (Renja) 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah, maka dilakukan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025. Dokumen ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai perubahan kondisi dan kebutuhan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sragen tetap selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Sragen dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dengan adanya Renja Perubahan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kecamatan Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah direncanakan.

Akhirnya, melalui Renja Perubahan Tahun 2025 ini, Kecamatan Sragen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

Sragen, 24 Juli 2024

KAMAT SRAGEN



Hesti Susanto, S.STP, M.Si.
Pembina Tk.I

NIP. 19780622 199711 1 001